

PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENUNJANG PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SUBBAG KERJA SAMA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA PEMPROV NTB

Ni Luh Tirthayuni Ganis Swari¹, Ida Ayu Nyoman Sutriani²

Program Studi Manajemen Ekonomi, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

niluhtirthayuniganis@gmail.com¹, dayunyoman23@gmail.com

Abstract. Budget management is an important aspect of supporting activities in the Cooperation Subdivision of the Government and Regional Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of West Nusa Tenggara Province. This article aims to identify budget allocation and compare budget allocations with expenditure realization in cooperation activities. This study uses a descriptive qualitative method through interviews and documentation of budget data. The results show that cooperation activities are divided into three categories: cooperation between regions, cooperation between regions and third parties, and cooperation evaluation. Budget allocation is predominantly directed toward cooperation between regions and cooperation between regions and third parties because these activities have higher demands. Meanwhile, the evaluation budget is flexible and can be used to support other activities with more urgent needs. The implementation of evaluation activities also faces challenges related to budget limitations and delays in data submission from regional government agencies. Budget management is carried out by considering activity needs and efficiency efforts through support from cooperation partners.

Keywords: Budget Management, Budget Allocation, Budget Realization, Regional Cooperation.

Abstrak. Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada Subbag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan OTDA Sekda Provinsi NTB. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian anggaran serta perbandingan antara anggaran dan realisasi pengeluaran pada kegiatan kerja sama. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi berupa data anggaran. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kerja sama daerah dengan daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. Alokasi anggaran lebih dominan diarahkan pada kegiatan kerja sama daerah dengan daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga karena memiliki permintaan yang lebih tinggi. Sementara itu, anggaran evaluasi bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lain yang lebih mendesak. Pelaksanaan evaluasi juga menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan keterlambatan penyampaian data dari OPD. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kegiatan dan upaya efisiensi melalui dukungan pihak mitra kerja sama.

Kata kunci: Pengelolaan Anggaran, Pengalokasian Anggaran, Realisasi Anggaran, Kerja Sama Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Sistem manajemen pengendalian memainkan peran krusial dalam menjamin bahwa semua aktivitas organisasi berlangsung sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, salah satu dari instrument tersebut adalah anggaran (Zalsabillah et al., 2026). Pengelolaan anggaran negara memegang posisi penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Puspitasari et al., 2026). Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam lingkaran keuangan negara, karena pada tahap ini semua program dan agenda pemerintah diimplementasikan secara konkret melalui pengeluaran negara (Timpal et al., 2026).

Anggaran tidak sekadar berperan sebagai sarana alokasi sumber daya, namun juga berfungsi sebagai alat pengawasan, penilaian kinerja, dan tanggung jawab kepada masyarakat (Paembonan et al., 2025). Pengelolaan anggaran berkaitan dengan sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan dan target yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan anggaran (Kristiani et al., 2026). Efisiensi dan efektivitas menunjukkan jika penggunaan anggaran telah diarahkan sesuai rencana dan kebutuhan pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilakukan. Karenanya, diperlukan pengelolaan yang tepat agar sumber daya yang tersedia dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal (Agustin et al., 2026).

Optimalisasi pengelolaan anggaran juga memerlukan koordinasi dan kerja sama antarbidang agar penggunaan sumber daya dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi (Choerunisa et al., 2024). Hal tersebut menjadi relevan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang melibatkan berbagai pihak dan memerlukan dukungan administrasi serta sumber daya dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kerja sama tidak hanya berkaitan dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga memerlukan proses administrasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (N. Wijayanti & Syafril, 2026). Hal ini tercermin dari beragam aktivitas kolaboratif yang ditangani oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB pada bagian subbag Kerja sama seperti diskusi dengan Pemerintahan kabupaten Sumbawa dan pelaksanaan kerjasama dengan kemitraan swasta serta pihak-pihak lainnya. (Biro Pemerintahan, 2026)

Berdasarkan data yang diperoleh, pada bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mendapatkan anggaran untuk 1 tahun berjalan pada tahun 2026 sebesar Rp 517,29 juta yang kemudian dibagi ke empat bagian. Pada bagian tata usaha sebesar Rp 77,29 juta, Pemerintahan sebesar Rp 100 juta, Otonomi daerah Rp. 210 juta dan kerja sama sebesar 130 juta. Anggaran tersebut disediakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan. Namun, pada subbag kerja sama anggaran yang terbatas menjadikan kegiatan seperti monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan lebih difokuskan pada penilaian

terhadap perkembangan kerja sama dan kinerja dengan memantau sejauh mana proses atau kemajuan yang sedang berlangsung. Dari data, anggaran yang tersedia untuk evaluasi pelaksanaan subbag kerja sama hanya sebesar Rp. 15 juta, sedangkan subbag otonomi daerah sebesar Rp. 135 juta dan untuk pemerintahan tidak memiliki evaluasi dikarenakan tidak adanya tugas pokok dan fungsi. Perbedaan anggaran untuk evaluasi pelaksanaan dengan otda menjadikan subbag kerja sama mempunyai anggaran terkecil untuk evaluasi.

Hal tersebut, memunculkan permasalahan mengenai bagaimana anggaran yang tersedia dikelola dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan pada Subbag Kerjasama, terutama saat anggaran yang tersedia cukup terbatas. Pengelolaan tersebut juga mencakup perencanaan dan alokasi anggaran sesuai kegiatan dengan tujuan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan anggaran pada instansi pemerintahan umumnya membahas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Diantaranya penelitian oleh Fahsa & Nustini (2026) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran sangat tergantung pada penerapan strategi penganggaran yang sesuai serta adanya pengawasan internal yang solid. Meskipun begitu, faktor-faktor operasional yang sulit diprediksi tetap menjadi tantangan utama dalam mempertahankan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Lalu penelitian oleh Rampengan et al (2016) menunjukan jika pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien, terutama dalam penggunaan biaya operasional. Namun, pelaksanaan anggaran masih menghadapi kendala yang terlihat dari adanya perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasinya.

Penelitian terdahulu, pembahasan mengenai anggaran pada instansi umumnya lebih menekankan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan serta pelaksanaan anggaran. Pada artikel ini lebih berfokus pada pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada unit kerja sama pemerintah daerah. Fokus penelitian dipilih berdasarkan kondisi pengelolaan anggaran pada Subbag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai pengelolaan anggaran dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan pada Subbag Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran merupakan alat utama dalam menciptakan pengaturan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berfokus pada hasil (Kristiani et al., 2026). Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan anggaran di daerah mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab. Kelima tahap ini harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi (Juliyanti et al., 2025).

Pelaksanaan Anggaran

Sujarweni (2024:65) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan fase yang dimulai setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui lewat peraturan daerah di setiap akhir tahun sebelum dimulainya tahun anggaran yang baru. Proses pelaksanaan ini berlangsung selama satu tahun, dimulai sejak awal tahun anggaran baru pada bulan Januari setiap tahunnya (K. Wijayanti & Yulianto, 2025). Pelaksanaan yang benar perlu dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditentukan, serta memerlukan pengawasan yang ketat untuk menjamin bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diatur (Wibowo & Ali, 2024).

Kerja Sama Daerah

Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No 50 Tahun 2007 mengenai prosedur pelaksanaan kerja sama daerah. Kerja sama antar daerah adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara gubernur dengan gubernur, gubernur dengan bupati atau walikota, bupati atau walikota dengan bupati atau walikota lain, serta antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Perjanjian ini dituliskan secara resmi dan menciptakan hak serta kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, kerja sama daerah melibatkan minimal dua aktor publik yang saling bekerja sama dan berkomitmen untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah (Putra, 2013)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan pengelolaan anggaran dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan pada Subbag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan aktivitas di Subbag Kerja Sama. Penelitian dilaksanakan di Subbag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jln pejanggik No 12, Kec Mataram lokasi tersebut dipilih karena merupakan bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi berupa data keuangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan anggaran, penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, serta kendala yang dihadapi. Data keuangan digunakan sebagai sumber pendukung untuk memberikan gambaran mengenai anggaran yang tersedia dan penggunaannya dalam pelaksanaan kegiatan pada Subbag Kerja Sama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pengelolaan anggaran dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan pada Subbag Kerja sama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengalokasian Anggaran pada Subbag Kerja sama

Tabel 1. Pengalokasian anggaran

No	Jenis kegiatan	Kelompok pengeluaran	Komponen anggaran	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran
1	Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	Administrasi	ATK, Kertas, cover, bahan cetak	2.250.000	360.000
		Koordinasi	Makanan dan minuman rapat	3.000.000	3.000.000

**PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENUNJANG PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA SUBBAG KERJA SAMA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA
PEMPROV NTB**

		pelaksanaan	Honorarium dan perjalanan dinas	59.750.000	8.521.240
Total				65.000.000	11. 881.240
2	Fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta	Administrasi	ATK, kertas, cover, bahan cetak dan benda pos	4.500.000	799.000
		Koordinasi	Makanan dan minuman rapat	12.500.000	11.225.000
		Pelaksanaan	Perjalanan dinas	33.000.000	3.103.360
Total				50.000.000	15.127.360
3	Evaluasi pelaksanaan kerja sama	Administrasi	ATK, bahan cetak dan benda post	1.000.000	1.000.000
		Koordinasi	Perjalanan dinas	14.000.000	2.200.000
Total				15.000.000	3.200.000
TOTAL SELURUH				130.000.000	30.208.600

Sumber : Data SPJ fungsional, 2026

Pada kegiatan fasilitasi kerja sama antar pemerintah, anggaran dialokasikan untuk kebutuhan administrasi, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan administrasi meliputi ATK, kertas, cover, dan bahan cetak. Sementara itu, kebutuhan koordinasi berupa makanan dan minuman rapat, sedangkan pelaksanaan kegiatan mencakup honorarium dan perjalanan dinas. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp65.000.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp11.881.240. Selanjutnya,

kegiatan fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta memiliki total anggaran sebesar Rp50.000.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 15.127.360 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan administrasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama memiliki total anggaran sebesar Rp15.000.000, yang dialokasikan untuk kebutuhan administrasi dan koordinasi. Sisa anggaran yang tercatat untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp3.200.000. Secara keseluruhan, jumlah anggaran yang tersedia tahun 2026 yang tercantum dalam tabel adalah sebesar Rp130.000.000, dengan total sisa anggaran sebesar Rp22.408.600. Data tersebut memberikan gambaran mengenai pengalokasian dan penggunaan anggaran pada setiap kegiatan di Subbag Kerja dari Januari hingga Agustus 2026.

Lalu, hasil wawancara dengan salah satu staf pada Subbag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan OTDA Sekda Provinsi NTB, kegiatan kerja sama terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kerja sama daerah dengan daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. Dari ketiga kegiatan tersebut, kerja sama daerah dengan daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga memiliki permintaan yang lebih tinggi, sehingga alokasi anggaran lebih dominan diarahkan untuk mendukung kedua kegiatan tersebut. Sementara itu, anggaran evaluasi memiliki sifat fleksibel dan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan kegiatan lain yang lebih mendesak, seperti undangan dari pemerintah pusat atau kegiatan kerja sama lainnya. Apabila kebutuhan anggaran pada kegiatan kerja sama telah terpenuhi, dana yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung kegiatan evaluasi. Selain itu, dalam proses kerja sama, Subbag Kerja Sama berupaya menekan pengeluaran dengan mengusahakan agar pihak mitra turut memberikan fasilitasi dan dukungan sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan kerja sama. Karenanya, pengalokasian dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat permintaan, dan prioritas pelaksanaan kegiatan kerja sama.

B. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengeluaran

Tabel 2. Perbandingan anggaran dan realisasi

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi pengeluaran	Sisa anggaran
----	----------------	--------------------	--------------------------	---------------

**PENGLOLAAN ANGGARAN DALAM MENUNJANG PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA SUBBAG KERJA SAMA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA
PEMROV NTB**

1	Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	Rp. 65.000.000	Rp. 53.118.760	Rp. 11.881.240
2	Fasilitasi Kerja samav badan usaha/ swasta	Rp. 50.000.000	Rp. 34.872.640	Rp. 15.127.360
3	Evaluasi pelaksanaan kerja sama	Rp. 15.000.000	Rp. 11.800.000	Rp. 3.200.000
Total		Rp. 130.000.000	Rp. 99.791.400	Rp. 30.208.600

Sumber : Data SPJ Fungsional, 2026

Tabel diatas bahwa setiap jenis kegiatan memiliki jumlah anggaran dan sisa anggaran yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan. Anggaran yang dialokasikan mencakup berbagai kebutuhan, seperti administrasi, koordinasi, dan perjalanan dinas yang mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama. Dalam proses kerja sama, Subbag Kerja Sama tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kerja sama, tetapi juga berupaya mengusahakan agar pihak luar yang diajak bekerja sama dapat turut memberikan fasilitasi dan dukungan dalam proses kerja sama tersebut. Agar pelaksanaan kerja sama tidak hanya bergantung pada fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang bekerja sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah ditentukan. Dari data, anggaran yang telah direalisasikan untuk tahun 2026 sampai bulan agustus sebesar Rp. 99.971.400 dengan realisasi anggaran yang belum digunakan Rp. 30.208.600 untuk sisa tahun 2026.

Dari Hasil wawancara, rincian realisasi dan sisa anggaran dikelola secara terpusat oleh bagian Tata Usaha (TU) atau Bendahara. Subbag Kerja Sama berperan sebagai pengguna anggaran, sedangkan laporan rincian, rekapitulasi realisasi, dan sisa anggaran dikelola oleh pihak yang menangani administrasi keuangan. Anggaran yang tercantum pada unit kerja juga disajikan dalam bentuk alokasi tahunan melalui sistem SIPD yang diakses oleh orang tertentu. data pengalokasian anggaran dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pembagian anggaran berdasarkan jenis kegiatan,

sedangkan data realisasi digunakan untuk melihat penggunaan anggaran pada masing-masing kegiatan.

C. Kendala Evaluasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Proses Kerja Sama

Pelaksanaan evaluasi kerja sama secara langsung melalui kunjungan lapangan menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Sebagai alternatif, Subbag Kerja Sama melakukan permintaan data kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui surat. Namun, respons atau umpan balik dari OPD terkadang mengalami keterlambatan atau tidak diberikan, sehingga dapat menghambat proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan kerja sama. Selain itu, anggaran evaluasi memiliki sifat fleksibel dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lain yang memiliki kebutuhan lebih tinggi atau lebih mendesak. Dalam pelaksanaan kerja sama, Subbag Kerja Sama juga berupaya menerapkan efisiensi penggunaan anggaran dengan menekan biaya yang dikeluarkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengusahakan agar pihak mitra turut memberikan fasilitasi dan dukungan sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa, penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan prioritas kegiatan, sementara dukungan dari pihak mitra diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran dalam proses pelaksanaan kerja sama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan anggaran pada Subbag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan OTDA Sekda Provinsi NTB, dapat disimpulkan bahwa anggaran dialokasikan untuk tiga jenis kegiatan, yaitu kerja sama daerah dengan daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. Pengalokasian anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti administrasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan. Penggunaan anggaran bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas kegiatan. Anggaran evaluasi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lain yang memiliki kebutuhan lebih tinggi atau lebih mendesak. Anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 99.791.400 dengan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 30.208.600. Selain itu, pelaksanaan evaluasi menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan keterlambatan umpan balik dari OPD

dalam penyampaian data. Dalam proses kerja sama, Subbag Kerja Sama juga berupaya menerapkan efisiensi dengan mengusahakan keterlibatan pihak mitra dalam memberikan fasilitasi dan dukungan kegiatan. Pengelolaan anggaran pada Subbag Kerja Sama diharapkan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas setiap kegiatan. Pemantauan penggunaan anggaran serta perencanaan dana evaluasi perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dan evaluasi dapat berjalan dengan lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, R., Pujia, D. P., Yulianti, E., Raya, U. T., Raya, U. T., & Raya, U. T. (2026). *ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA NEGARA UNTUK MENILAI PADA PENYELENGGARA BUDDHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA. 1*, 68–80. <https://doi.org/doi.org/10.46576/bn.v9i1.7459>
- Choerunisa, Z. A., Ridwansyah, P., Prananda, A. A., Sapbrina, J. P., & Muksin, A. (2024). *OPTIMALISASI KINERJA DAN PENGELOLAAN ANGGARAN: RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH. 2*, 106–114. <https://doi.org/jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1712>
- Fahsa, D. S., & Nustini, Y. (2026). EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA UNIT BUDGETING SALAH SATU INSTANSI DI YOGYAKARTA Dina. *Journal of Social and Economics Research*, 8(1), 495–508. <https://doi.org/doi.org/10.54783/jser.v8i1.1444>
- Juliyanti, I., Zakaria, A., & Khairunnisa, H. (2025). Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabuapten Sumedang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(2), 375–386. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.13>
- Kristiani, R., Lambe, K. H. P., & Malissa, M. (2026). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah*. <https://doi.org/doi.org/10.1610/31eg9j60>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kabupaten Biak Provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Pemerintahan, B. (2026). *Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa Sepakati Kerja Sama Terkait SPAM Semongkat*. <https://Biropemerintahan.Ntbprov.Go.Id/.https://biropemerintahan.ntbprov.go.id/post/pemprov-ntb-dan-pemkab-sumbawa-sepakati-kerja-sama-terkait-spam-semongkat>
- Puspitasari, D., Rachmawaty, R., & Sahroni, S. (2026). Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dalam Pencapaian Realisasi Anggaran Pada Kantor ATR/BPN Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 3683–3692. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6649>
- Putra, I. R. A. S. (2013). Identifikasi pelaksanaan kerjasama daerah identification the implementation of regional cooperation. *Jurnal Bina Praja*, 5(1), 113–122.

- Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 616–623. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>
- Timpal, A. E., Tene, J. H., & Santie, J. K. (2026). Analisis Implementasi Mekanisme Penerbitan SP2D Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Pada BPJN Sulut. 5(6), 9616–9630. <https://doi.org/doi.org/10.56799/ekoma.v5i6.18075>
- Wibowo, C. S., & Ali, H. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Halaman III DIPA terhadap Realisasi Anggaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, Vol,5 No 4(4), 1266–1274. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>
- Wijayanti, K., & Yulianto. (2025). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Bekasi. *Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan*, 7(1), 10–16. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JATIBARU/article/view/5563>
- Wijayanti, N., & Syafril, R. (2026). Peran Bagian Kerja Sama dalam Meningkatkan Efisiensi antar Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(2), 12951–12958. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i2.39212>
- Zalsabillah, I., RiyaniDjangkaru, R., Lintang Putri, R., Putri Krisna, C. D., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2026). Studi Literatur: Peran Penyusunan Anggaran Dalam Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(3), 284–289. <https://doi.org/10.56799/jim.v5i3.14604>